PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp (0358) 3516135 e-mail : kesbangpolkab.nganjuk@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 357 /K/411.405/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Aksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023.
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Perubahan Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

KESATU : Menetapkan Indikator Perubahan Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Recana Aksi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

KETIGA : Perubahan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 1 Nopember 2023

an. BUPATI NGANJUK

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

PERUBAHAN RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Rencana Aksi	Target Kinerja Sasaran				Penanggungjawab
			Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)		I	II	III	IV	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											SEKRETARIS
	1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*											SEKRETARIS
	1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Lap	32.220.000	24 Lap	40.346.000	Menyiapkan bahan (Bahan LKPJ, LPPD, LKjIP, Renstra, Renja, RKA,DPA, Capaian Kinerja) Menyusun (Bahan LKPJ, LPPD, LKjIP, Renstra, Renja, RKA,DPA, Capaian Kinerja) Mengirim ke instansi terkait (Bahan LKPJ, LPPD, LKjIP, Renstra, Renja, RKA,DPA, Capaian Kinerja) Evaluasi kegiatan	6 lap	4 lap	7 lap	7 lap	Perencana
	2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*											SEKRETARIS
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	1.699.852.068	14 orang	2.090.490.000	Menyiapkan pengajuan gaji dan tunjangan ASN beserta pendukung Mengajukan dokumen gaji pada atasan Mengirim dokumen gaji ke instansi terkait Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Perencana
	2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1.120.000	1 dok	5.172.500	Menyiapkan bahan-bahan laporan Menyusun laporan Mengirim dokumen laporan ke instansi terkait Evaluasi kegiatan	80%	-	-	20%	Perencana
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dok	13.370.000	12 dok	21.770.000	Menyiapkan bahan-bahan laporan Menyusun laporan Mengirim dokumen laporan ke instansi terkait Evaluasi kegiatan	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	Perencana
	3 *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*											SEKRETARIS
	3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3.750.000	2 paket	8.818.000	Menyiapkan bahan Menyusun laporan Evaluasi kegiatan	-	-	-	2 paket	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	30 Orang	40.100.000	30 Orang	61.090.000	Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan bimbingan Evaluasi Kegiatan	20%			80%	Sub bag Umum dan Kepegawaian

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Rencana Aksi	Target Kinerja Sasaran				Penanggungjawab
				Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)		I	II	III	IV	
	4	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*											SEKRETARIS
	4.1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bln	60.180.080	12 bln	60.180.080	Melakukan inventarisir kebutuhan bahan logistik Melakukan pembelian bahan logistik Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	4.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bln	10.178.130	12 bln	10.178.130	Melakukan inventarisir kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Proses cetak dan penggandaan Melakukan pembelian bahan logistik Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	4.3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bln	6.000.000	12 bln	6.000.000	Memilih bahan bacaan/surat kabar berlangganan Menerima surat kabar Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	4.4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	88.410.000	12 bln	129.010.000	Melakukan verifikasi dasar pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi Membuat surat tugas Menyiapkan akomodasi Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	5	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*											SEKRETARIS
	5.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	146.736.120	10 Unit	155.540.440	Melakukan inventarisir kebutuhan Membuat dokumen pengadaan Melakukan transaksi pembelian Melakukan cek fisik Menyerahkan barang kepada pemakai Evaluasi kegiatan	8 unit	-	-	2 unit	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	6	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*											SEKRETARIS
	6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bln	1.500.000	12 bln	1.500.000	Melakukan pembelian materei Penggunaan materei untuk SPJ dan keperluan lain Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bln	73.200.000	12 bln	73.200.000	Menerima tagihan listrik, telepon dan internet Membayar tagihan listrik, telepon dan internet Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bln	35.505.500	12 bln	35.505.500	Menginventarisir jasa peralatan dan perlengkapan kantor Melakukan pembelian/pembayaran Pembayaran jasa tenaga kebersihan Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Rencana Aksi	Target Kinerja Sasaran				Penanggungjawab
				Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)		I	II	III	IV	
	7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*											SEKRETARIS
	7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bln	132.639.300	12 bln	148.793.600	Menyiapkan kebutuhan BBM operasional kegiatan Melakukan pembayaran pajak kendaraan Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bln	23.900.000	12 bln	23.900.000	Menginventarisir jadwal pemeliharan/ kerusakan peralatan Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemeliharan/perbaikan Pihak ketiga melakukan pemeliharaan/perbaikan Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian
	7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bln	328.997.650	12 bln	328.997.650	Melakukan pemeliharan bagian-bagian gedung yang rusak Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemeliharan/perbaikan Pihak ketiga melakukan pemeliharaan/perbaikan Membatar jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan Evaluasi kegiatan	25%	25%	25%	25%	Sub bag Umum dan Kepegawaian
II	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**												KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
	8.	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*											KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
	8.1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	706 orang	147.522.460	2706 orang	1.022.214.140	Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan Pendidikan Bela Negara Bagi Perempuan Peningkatan edukasi kebangsaan Peningkatan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan di 20 Kec	- - - 1 kali - -	1 kali 1 kali 1 kali - - -	- - - - 1 kali -	- - - - - 20 kali	Analis Kebijakan
	8.2.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 lap	3.340.000	4 lap	3.340.000	Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan	33%	33%	34%	0%	Analis Kebijakan
III	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**												KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Rencana Aksi	Target Kinerja Sasaran				Penanggungjawab
				Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)		I	II	III	IV	
	9.	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*											KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	9.1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700 orang	224.676.278	200 orang	120.682.218	Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	-	-	2 kali	-	Analis Kebijakan
	9.2.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 parpol	5.213.715.000	10 parpol	30.222.414.644	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	-	10 parpol	-	-	Analis Kebijakan
				2 lembaga		2 lembaga		Hibah kepada KPU dan Bawaslu	-	-	-	2 lembaga	
	9.3.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 lap	2.320.000	3 lap	2.320.000	Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan	-	48%	52%	-	Analis Kebijakan
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**												KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	10.	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*											KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	10.1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 ormas	710.317.800	12 ormas	1.179.700.000	Belanja hibah Kepada Ormas	5 ormas	-	-	7 ormas	Analis Kebijakan
				4 keg		4 keg		Tim Terpadu pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25%	25%	25%	25%	
				100 org		0 org		Sosialisasi Undang-Undang Bidang Organisasi Kemasyarakatan	-	0 kali	-	-	
	10.2.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 lap	2.900.000	3 lap	2.900.000	Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan	-	39%	39%	22%	Analis Kebijakan
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**												KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Rencana Aksi	Target Kinerja Sasaran				Penanggungjawab
				Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)		I	II	III	IV	
	11.	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*											KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
	11.1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	54.999.960	450 orang	154.999.960	Forum Kerukunan umat Beragama	-	-	1 kali	-	Analis Kebijakan
								Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	-	1 kali	-	
								Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	-	-	-	3 kali	
	11.2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 lap	900.000	3 lap	900.000	Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan	100%	-	-	-	Analis Kebijakan
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**												KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
	12.	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*											KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
	12.1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 orang	377.135.200	400 orang	377.135.200	Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	Analis Kebijakan
								Forum Kewaspadaan Dini Daerah	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	
								Sosialisasi FKDM	-	2 kali	2 kali	-	
	12.1.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 lap	900.000	12 lap	900.000	Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan	40%	33%	33%	0%	Analis Kebijakan
	12.3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dok	7.534.295.000	12 dok	7.709.495.000	Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rakor Forkopimda Rakor Forkopimda Evaluasi pelaksanaan kegiatan	25%	25%	25%	25%	Analis Kebijakan

Nganjuk, 1 Nopember 2023
an. BUPATI NGANJUK
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nganjuk

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002